



DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI BELANDA

Ade Ariandi Saputra ¹

¹ STAI Al-Mujtahadah Pekanbaru, Indonesia
Ariandiade79@gmail.com

Article History:

Received: 11 Januari 2025
Revised: 25 Januari 2025
Accepted: 3 Februari 2025
Published: 27 Februari, 2025

Keywords:

Islamic Education,
Netherland

*Correspondence Address:

Ariandiade79@gmail.com

Kata Kunci:

Pendidikan Islam,
Belanda

Abstract:

The growth of Islamic education is paralleling the rise in Muslim immigrants worldwide, including European nations such as the Netherlands. The Dutch government's stance on Islamic education was shaped by historical factors and socio-cultural circumstances. The objective of this research is to acquire a thorough comprehension of the evolutionary course of Dutch government policy regarding Islamic education. Additionally, it seeks to offer valuable perspectives on the country's stance towards Islamic religious education and its influence on the broader education system in the Netherlands. This research method employs a library study approach. The research findings demonstrate that the formulation of Islamic religious education policy in the Netherlands is significantly shaped by the historical, social, and political circumstances of the country. During the 16th and 18th centuries, the progress of Islamic religious education was hindered by the small population of Dutch Muslim residents. During the 19th century, Islamic education remained predominantly focused within mosques. In the 20th century, the government acknowledged the entitlement to receive religious instruction, leading to the authorization of Islamic schools in the Netherlands

Abstrak:

Pendidikan Islam semakin lama semakin berkembang seiring bertambahnya imigran muslim di seluruh dunia termasuk negara-negara eropa salah satunya Belanda. Perkembangan sikap pemerintah Belanda mengenai pendidikan Islam dipengaruhi oleh aspek sejarah dan kondisi sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang proses evolusi kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam dan memberikan wawasan berharga mengenai sikap negara ini terhadap pendidikan agama Islam dan dampaknya terhadap keseluruhan sistem pendidikan di sana. Metode Penelitian ini adalah pendekatan study pustaka. Hasil penelitian menggambarkan dinamika kebijakan Pendidikan agama Islam di Belanda sangat dipengaruhi oleh keadaan sejarah, sosial, dan politik negara tersebut. Pada 16 dan 18 pendidikan Agama Islam tidak banyak perkembangannya karena jumlah penduduk Muslim Belanda masih sangat terbatas. Pada Abad 19, pendidikan Agama Islam masih berpusat di mesjid-mesjid. Mulai abad 20, Pemerintah mengakui hak untuk mendapat pendidikan agama dan dan sekolah-sekolah Islam mulai di izinkan beroperasi di Belanda.

PENDAHULUAN

Belanda telah mengalami transisi bertahap dalam beberapa dekade terakhir, dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah imigran Muslim. Pergeseran persepsi di Belanda juga dipengaruhi oleh peningkatan populasi Muslim yang signifikan. Menurut data yang tersedia, populasi Muslim di Belanda mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode 1971 hingga 2004, dengan perkiraan menunjukkan peningkatan dari sekitar 50.000 orang pada tahun 1971 menjadi sekitar 946.000 orang pada tahun 2004. Pergeseran demografis tersebut menghasilkan peningkatan pengakuan dan keterlibatan agama Islam dalam masyarakat Belanda. Belanda adalah rumah bagi sekitar 920.000 Muslim, yang merupakan sekitar 6% dari keseluruhan populasi negara tersebut. Di pusat kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag. Di kota Utrecht, proporsi penduduk Muslim melebihi 10%. Mayoritas muslim tersebut adalah imigran berasal dari Turki, Maroko, Suriname, Irak, Afghanistan, Iran dan Somalia (Driessen & Merry, 2006). Berdasarkan data statistik Central Bureau de Statistiek, Kenaikan rata-rata 0,6 persen setahun. Umat Islam itu berasal dari Turki (46 %), Maroko (38.8%), Suriname (6.2%), Pakistan (2.2%), Mesir (0.7%), Tunisia (0.9%), Indonesia (1.6%), dan lainnya (3.9%)(Albada et al., 2021). Tingginya jumlah penduduk Muslim di Belanda pendidikan agama Islam seharusnya diatur dengan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Keadaan sejarah, sosial, dan politik semuanya berperan dalam membentuk pengembangan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan Islam. Dengan memahami perkembangan ini, kita bisa mendapatkan perspektif mengenai cara negara ini menangani keberagaman agama dan dampaknya terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan (Basori, 2019). Perkembangan Islam di Belanda tidak lepas dari upaya Abdul Wahid Van Bommel. Organisasi Federasi Muslim Nederland, di bawah kepemimpinan Abdul Wahid, memiliki kehadiran yang menonjol di kalangan kelompok Islam. Organisasi ini mengalami transformasi berikutnya dan kemudian berganti nama menjadi *Islamitische Informatie Cendrum*. Di dalam lembaga ini, beliau secara aktif mengadvokasi hak dasar untuk melaksanakan salat lima waktu, termasuk salat Jumat yang penting. Organisasi ini juga menyuarakan persamaan hak dan kewajiban muslim dalam mendapat pendidikan agamanya. Buku nya berjudul “Muslim in the Netherlands or Dutch Muslim: a Minority Within a Minority” membawa pengaruh yang cukup besar dalam dukungan pemerintah Belanda terhadap muslim, terutama pendidikan Islam (Altinyelken, 2021).

Namun hal ini mengalami pasang surut seiring dengan sentimen komunitas muslim paska terjadinya serangan 11 September tahun 2001, serta pembunuhan politisi Pim Fortuyn pada tahun 2002 dan sutradara film Theo van Gogh pada tahun 2004, sentimen publik terhadap Islam mengalami pergeseran ke arah sikap anti-Islam yang lebih nyata (I. Ter Avest, 2023). Namun demikian hal ini tidak menghentikan dukungan dari pemerintah Belanda yang tetap memberi kepastian hukum dalam kebijakan pendidikan Islam.

Menurut Kamphuis & Bertram-Troost (2023) Implementasi kebijakan pendidikan Islam memiliki arti penting dalam meningkatkan kebebasan beragama, pemahaman budaya, dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus menjamin kepatuhan terhadap standar tinggi dan praktik yang bertanggung jawab dalam lembaga pendidikan. Selain itu, patut dicatat bahwa agama juga berperan penting dalam mengatasi kesulitan yang ada saat ini, seperti ekstremisme dan dinamika antar agama (van Bijsterveld, 2013). Pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut secara seimbang dan inklusif adalah hal yang paling penting bagi kesejahteraan komunitas Muslim dan masyarakat pada umumnya (Daun & Arjmand, 2018). Menurut Leeman (2008) Implementasi kebijakan pendidikan Islam memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip kebebasan beragama, melestarikan identitas budaya dan agama, memfasilitasi integrasi sosial dan toleransi, memerangi ekstremisme, dan memberikan

kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan holistik dan kesejahteraan individu dan komunitas (Franken & Vermeer, 2019). Hal ini memberikan pengaruh yang beragam pada berbagai aspek keberadaan manusia dan mengambil peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan keyakinan individu dan masyarakat.

Seiring pertambahan jumlah penduduk muslim yang signifikan, dalam beberapa tahun terakhir, topik pendidikan Islam di Belanda semakin mendapat perhatian dan menjadi bahan kajian dan diskusi ekstensif. Kritikus tertentu berpendapat bahwa sekolah Islam berpotensi mendukung keyakinan yang tidak sesuai dengan masyarakat Belanda atau mungkin memperburuk segregasi sosial. Akibatnya, terdapat kebutuhan yang semakin besar untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pendidikan Islam. Perkembangan kebijakan pemerintah Belanda yang berkaitan dengan pendidikan Islam mempunyai konsekuensi yang luas terhadap keseluruhan sistem pendidikan.

Isu-isu di atas telah menarik perhatian pada kompleksitas dan diskusi mengenai keberagaman, integrasi, dan pelestarian kebebasan beragama dalam komunitas heterogen. Perdebatan tentang sekolah Islam di Belanda tidak diragukan lagi terkait dengan ruang lingkup perdebatan yang lebih luas tentang Islam dan Muslim di masyarakat Belanda. Hal ini penting mengingat negara ini secara historis memiliki kebijakan pendidikan yang liberal dan inklusif. Interaksi dinamis antara sistem sekolah di Belanda dan imigrasi Muslim telah memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan pendidikan di negara tersebut. Keadaan sejarah, sosial, dan politik semuanya berperan dalam membentuk pengembangan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan Islam. Dengan memahami perkembangan ini, kita bisa mendapatkan perspektif mengenai cara negara ini menangani keberagaman agama dan dampaknya terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang sistematis. Langkah awalnya penetapan topik atau tujuan penelitian yang tepat yang berfungsi sebagai prinsip panduan di seluruh proses evaluasi. Tujuan utama melakukan analisis dalam tinjauan pustaka adalah untuk menghasilkan wawasan berharga, menemukan bidang penelitian yang belum dieksplorasi secara memadai, dan menyajikan narasi kohesif yang berkontribusi terhadap kemajuan pengetahuan di bidang Pendidikan Islam di Belanda.

Proses pengumpulan data dalam tinjauan literatur memerlukan ekstraksi informasi yang relevan dari sumber ilmiah yang dipilih. Hal ini mencakup penemuan signifikan, pendekatan penelitian, kerangka konseptual, dan informasi relevan lainnya yang berhubungan dengan Imigran muslim dan Pendidikan Islam di Belanda. Proses analisis dalam studi literatur memerlukan penggabungan dan penjelasan materi yang diperoleh dari sumber yang dipilih. Teknik analisis dalam penelitian akademis mencakup analisis isi, yang memerlukan identifikasi tema dan pola umum dalam literatur yang ada; analisis komparatif, yang melibatkan penajajaran temuan dan argumen dari berbagai sumber; penilaian kritis, yang mencakup evaluasi terhadap kualitas dan kredibilitas sumber; dan konstruksi kerangka konseptual atau model berdasarkan informasi yang disintesis.

HASIL DAN DISKUSI

1. Abad ke-16 hingga 18

Selama abad ke-16, wilayah geografis yang sekarang dikenal sebagai Belanda berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Spanyol. Selama masa sejarah ini, terdapat tingkat keterlibatan yang terbatas dengan agama Islam, yang sebagian besar difasilitasi oleh transaksi komersial dan pertukaran diplomatik. Belanda secara aktif berpartisipasi dalam pertukaran komersial

dengan berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk dunia Islam, sehingga memfasilitasi paparan mereka terhadap budaya dan komoditas Islam. Selama abad ke-16 dan ke-17, terjadi peristiwa bersejarah penting yang dikenal sebagai Pemberontakan Belanda, yang ditandai dengan Perlawanan penduduk Belanda terhadap pemerintahan Spanyol (Spruyt, 2007). Perjuangan yang berkepanjangan ini akhirnya mencapai puncaknya dengan berdirinya Republik Belanda, yang berujung pada tercapainya kemerdekaan bagi wilayah yang sering disebut dengan Belanda. Berdirinya Republik Belanda terjadi pada tahun 1588. Selama periode ini, Republik Belanda menjadi kekuatan perdagangan dan angkatan laut yang terkemuka, sekaligus menjalin dan memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam. Kota Amsterdam muncul sebagai pusat perdagangan global yang terkemuka, menarik beragam pedagang, termasuk Muslim (Rietveld-van Wingerden et al., 2009).

Pada awalnya, Belanda adalah bagian dari Kekaisaran Spanyol dan kemudian di bawah pemerintahan Prancis. Pada periode ini, pendidikan Islam tidak secara eksplisit diatur, dan Muslim di Belanda kebanyakan adalah pedagang atau tentara asing. Pada awal abad ke-19, Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis sebagai bagian dari Kekaisaran Napoleon (Franken & Bertram-Troost, 2022). Masa pemerintahan Prancis yang berlangsung dari tahun 1810 hingga 1813 ini tidak mengubah secara signifikan status umat Islam atau pendidikan Islam di Belanda. Penerbitan buku tentang Islam dalam bahasa Latin, sebuah bahasa yang dapat diakses terutama oleh para akademisi, di Belanda dalam bidang kajian Islam setelah era tersebut (I. Ter Avest, 2023). Pada periode ini, Belanda mengemban tugas penting yaitu menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Belanda untuk pertama kalinya (Miller, 2011).

Informasi yang tersedia mengenai sekolah Islam di Belanda pada masa ini sangat minim. Namun demikian, diakui secara luas bahwa selama periode ini, terdapat interaksi komersial antara Belanda dan Kesultanan Utsmaniyah, sehingga menghasilkan opini Islam yang lebih baik di kalangan pedagang dan negarawan Calvinis Belanda.

2. Abad ke-19

Pada abad ke-19, setelah Belanda merdeka dari Prancis pada tahun 1815, ada perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah mulai mengatur sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah agama. Pendidikan Islam diatur secara lebih formal, meskipun masih minoritas. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda mengalami lonjakan imigrasi yang signifikan, dengan individu-individu yang berasal dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia (yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada periode tersebut) dan Timur Tengah. Namun perlu dicatat bahwa regulasi pendidikan Islam belum ditetapkan secara resmi pada kurun waktu tersebut. Selain itu, perlu disebutkan bahwa umat Islam yang tinggal di Belanda merupakan populasi minoritas, dan sering kali terlibat dalam berbagai pekerjaan, seperti perdagangan (K. H. (Ina. Ter Avest & Rietveld-van Wingerden, 2017).

Masuknya pekerja migran, kadang-kadang disebut sebagai pekerja tamu, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1960an dan 1970an, terutama dari Turki dan Maroko, menghadirkan pertemuan penting dengan tradisi agama yang asing: Islam, di negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Pada awalnya, sesuai dengan sebutannya sebagai pekerja “tamu”, baik masyarakat Belanda maupun para pekerja tamu itu sendiri mempunyai keyakinan bahwa pada akhirnya mereka akan kembali ke negara asalnya masing-masing (Tahira & Saadi, 2022). Namun demikian, terjadi pergeseran keadaan, dan sepanjang tahun 1980-an pada abad sebelumnya, proses penyatuan kembali dengan pasangan dan anak-anak dimulai, yang mengarah pada integrasi anak-anak Muslim ke dalam sistem pendidikan Belanda (Daun & Arjmand, 2018).

Kejelasan situasi ini meningkat ketika sejumlah besar umat Islam mulai bermigrasi ke Belanda mulai tahun 1960an. Terlepas dari adanya interaksi perdagangan dengan negara-negara Muslim, hubungan kolonial dengan negara Islam terbesar di dunia (Hindia Timur), dan tradisi pencarian keilmuan di bidang studi Islam yang luas dan patut diperhatikan, Islam masih merupakan fenomena yang relatif asing di dunia. bidang publik dan pendidikan. Meskipun terdapat *Orbis Sensualium Pictus* karya Comenius, namun jarang sekali lembaga pendidikan memasukkan ajaran Islam (Franken & Vermeer, 2019). Contoh terbatas di mana para pendidik mengarahkan fokus mereka terhadap agama tertentu terjadi dalam konteks sesi pengajaran yang berpusat pada upaya para misionaris Kristen yang berupaya untuk menyebarkan agama kepada individu-individu yang diidentifikasi sebagai "orang-orang Mohammedan yang miskin, namun berpoligami, dan kurang informasi" (Ligthart 1917, 165). Menurut Westerman (1994, 30-31), penggambaran Islam dalam sastra anak-anak sangat kurang baik. Salah satu penjelasan yang masuk akal adalah bahwa penyelidikan ilmiah di bidang studi Islam sebagian besar terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang mencakup Hindia Timur dan Timur Tengah, sementara penelitian terhadap Islam secara relatif diabaikan seperti yang dilakukan di negara-negara yang secara geografis berdekatan seperti Turki dan Afrika Utara.

Pendidikan di Belanda disusun menurut beberapa pilar yang melambangkan pandangan dunia yang berbeda: Protestan, Katolik Roma, dan sosial-humanistik. Pilar-pilar tersebut tercermin dari jenis sekolah yang tersedia, yaitu sekolah Protestan, sekolah Katolik Roma, dan sekolah negeri yang bersikap netral. Akibat terjadinya reuni keluarga, para pendidik, khususnya di sekolah-sekolah tersebut, dihadapkan pada kehadiran siswa berlatar belakang Islam di dalam kelasnya. Para siswa ini telah disosialisasikan dalam pandangan dunia keagamaan yang berbeda baik dari keyakinan instruktornya maupun kerangka keagamaan yang dianut oleh sekolah. Berbagai model dibentuk untuk mengakomodasi dan merespons keadaan baru ini. Tulisan ini menguraikan tiga paradigma, dengan fokus khusus pada model "pendidikan antaragama" (Beijerse & Boone, 2022). Menanggapi pengakuan pemerintah Belanda terhadap Islam sebagai dasar yang layak untuk pendirian sekolah Islam, orang tua Muslim mengambil keputusan sekitar 25 tahun yang lalu untuk mendirikan sekolah dasar Islam sendiri. Keputusan ini diambil meskipun ada upaya sebelumnya untuk memasukkan umat Islam ke dalam sekolah-sekolah denominasi yang ada. Sebuah "pilar" baru telah terbentuk, mengingat terbatasnya pendaftaran anak-anak Islam di sekolah dasar Islam. Segmen populasi yang dominan terdiri dari mereka yang bersekolah di institusi pendidikan Protestan, Katolik Roma, atau publik.

Semua institusi pendidikan, apapun afiliasi agamanya (Protestan, Katolik Roma, negara bagian, atau Islam), diwajibkan untuk memasukkan mata pelajaran yang sebelumnya dikenal sebagai "Geestelijke Stromingen" (filsafat hidup agama dan sekuler) ke dalam kurikulum mereka. Tujuan dari mata pelajaran ini adalah untuk mendidik siswa tentang aspek-aspek mendasar dari berbagai pandangan dunia yang dipraktikkan oleh individu-individu di Belanda. Di zaman sekarang, topik tersebut telah dimasukkan ke dalam disiplin akademis baru yang dikenal sebagai "pendidikan kewarganegaraan". Bidang ini menekankan pada hidup berdampingan, penghormatan, dan penerimaan terhadap mereka yang dianggap "yang lain" dalam konteks masyarakat demokratis.

Menurut Altinyelken (2021) Beberapa penelitian sebelumnya mengenai masalah ini mengungkapkan bahwa Pendidikan Islam mengacu pada pendidikan masjid adalah 'upaya transnasional yang membawa pengaruh kuat dari negara asal dan mendukung komunitas imigran di Eropa dengan kelangsungan identitas agama, budaya, dan nasional mereka' (Altinyelken & Sözeri, 2019: 61). Penting untuk dicatat bahwa pendidikan masjid diselenggarakan secara independen oleh masjid dan tidak tunduk pada otoritas pengaturan dan pengawasan lembaga negara di Belanda (Pels, 2014). Hal ini sering terjadi pada akhir pekan atau sepulang sekolah dan diikuti oleh anak-anak usia sekolah dasar (sampai usia 12 tahun),

meskipun ada pula yang berlanjut hingga mereka menyelesaikan pendidikan menengah. Anak-anak tersebut sebagian besar diajar dalam kelompok sesama jenis, meskipun terkadang pengelompokan tersebut diatur menurut usia anak atau tingkat pengetahuan Islam. Jumlah total jam pengajaran berbeda-beda di setiap masjid: beberapa masjid hanya menawarkan 2–3 jam pada hari Sabtu, sementara masjid lainnya menjadwalkan kelas berdurasi 3 jam pada hari Sabtu dan Minggu. Meskipun para imam memikul tanggung jawab pendidikan dan mengajar beberapa kelompok, khususnya di masjid-masjid yang lebih besar, sebagian besar kelas diajarkan oleh ‘guru’ sukarelawan. Meskipun disebut guru, mereka sebenarnya tidak dilatih dalam bidang pedagogi, dan dipilih berdasarkan pengetahuan Al-Qur’an, kemampuan berbahasa Arab, dan motivasi mereka (Akhtar, 2018; Sözeri, Altinyelken & Volman, 2019; Selim, 2018).

3. Abad ke-20 hingga kini

Seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di Belanda karena imigrasi, pendidikan Islam semakin diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1957, pemerintah Belanda memberikan subsidi untuk pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum. Asal usul pendidikan Islam di Belanda dapat dikaitkan dengan masuknya imigran dari negara-negara Islam, terutama sepanjang abad ke-20. Para pendatang tersebut berupaya mempertahankan warisan budaya dan agamanya, termasuk memberikan pendidikan Islam kepada keturunannya. Pada tahap awal, pendidikan Islam sebagian besar disampaikan secara informal, terutama di lingkungan masjid dan pusat-pusat Islam.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pemerintah Belanda, sebagai respons terhadap pertumbuhan komunitas Muslim, memulai upaya untuk secara formal memenuhi kebutuhan akan peraturan pendidikan Islam. Pada era ini, Belanda menyaksikan berdirinya sekolah dasar Islam resmi yang pertama, yang biasa disebut sekolah dasar Islam. Pada tahun 1986, terjadi perkembangan yang signifikan di bidang pendidikan seiring dengan berlangsungnya integrasi ke dalam sistem pendidikan umum. Selama periode antara tahun 1970an hingga 1990an, terjadi pengakuan dan pertumbuhan yang signifikan di berbagai bidang (Dronkers, 2016).

Sepanjang tahun 1980-an di Belanda, sebagian orang tua Muslim menyatakan ketidakpuasannya terhadap cara pengajaran Islam di lembaga-lembaga pendidikan Kristen dan publik. Di lembaga pendidikan Kristen, kajian Islam biasanya dilakukan melalui kacamata agama Kristen. Sebaliknya, sekolah negeri bertujuan untuk mengadopsi pendekatan yang tidak memihak dan obyektif, namun secara tidak sengaja menyajikan ajaran Islam baik dari perspektif Kristen liberal maupun konservatif. Salah satu pencapaian penting terjadi pada tahun 1986 dengan penerapan kebijakan "Sekolah Weer Samen Naar" (WSNS), yang berupaya memfasilitasi inklusi anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan reguler. Pendekatan ini secara tidak langsung berkontribusi pada dimasukkannya sekolah Islam ke dalam sistem pendidikan publik. Ini membuat gerakan ketidakpuasan orang tua beragama Islam. Menanggapi ketidakpuasan mereka, sekelompok orang tua Muslim mendirikan lembaga pendidikan Islam independen pada tahun 1987. dkk., 2019).

Setelah awal berdirinya yayasan pada tahun 1987, terjadi peningkatan pendirian sekolah Islam. Didirikan pada tahun 1988, Ibnu Ghaldoun berdiri sebagai sekolah dasar Islam perdana di Belanda. Peristiwa ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa dalam kemajuan pendidikan Islam. Selanjutnya, sejumlah lembaga pendidikan Islam selanjutnya didirikan di seluruh Belanda. Proses ini menemui kontroversi dan perdebatan sengit di masyarakat Belanda (Driessen 2019). Sekolah-sekolah ini dibentuk untuk memberikan pendidikan Islam kepada anak-anak keturunan Turki dan Maroko di Belanda. Sekolah Al-Ghazali di Rotterdam mendapat dukungan dari orang tua Turki, sedangkan sekolah Tariq Ibnoe Ziyad di Eindhoven mendapat bantuan dari orang tua Maroko (Budak et al., 2019).

Menurut (Driessen, 2021) Sistem pendidikan Islam di Belanda mencakup tiga bentuk berbeda: (1) Pendidikan Masjid, yang berlangsung di lingkungan masjid, (2) Pendidikan Agama Islam (IRE) yang ditawarkan di sekolah negeri, dan (3) Sekolah Islam swasta. Setelah melewati tantangan yang berkepanjangan, komunitas Muslim di Belanda akhirnya mendapatkan izin dari otoritas terkait untuk membangun sekolah Islam, sehingga memenuhi kebutuhan pendidikan Islam di kalangan keluarga Muslim untuk anak-anak mereka.

Pendirian sekolah Islam di Belanda dimulai pada tahun 1980, sebagaimana didokumentasikan oleh Merry dan Driessen. Meski demikian, pendirian pesantren perdana tersebut baru terjadi pada tahun 1988. Pendirian pesantren tersebut merupakan proses yang berlarut-larut karena kurangnya keahlian dan ketidakpahaman terhadap seluk-beluk birokrasi di kalangan aktor Muslim yang terlibat, ditambah dengan terbatasnya kemampuan mereka dalam bahasa Belanda. Selain itu, individu yang secara proaktif mengambil tindakan sering kali hanya menemui sedikit kolaborasi baik dari lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Dalam banyak kasus, individu merasa bahwa badan-badan pemerintahan secara aktif mendukung sikap yang menghalangi pembentukan lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, setelah penantian yang panjang, usaha keras komunitas Muslim untuk mendirikan madrasah akhirnya mencapai puncaknya. Imigran Muslim yang tinggal di Belanda telah melakukan upaya untuk menciptakan lembaga pendidikan yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam (Ritonga, 2022).

Ada anggapan bahwa orang tua yang mayoritas Muslim konservatif ingin mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah Islam, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung interpretasi Islam yang ortodoks dan fundamentalis, yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat liberal Belanda. Sebaliknya, ada pula yang berpendapat bahwa pendirian sekolah Islam mungkin bisa memfasilitasi pembebasan umat Islam dalam masyarakat Belanda. Mereka berpendapat bahwa pemisahan sementara berpotensi meningkatkan harga diri umat Islam, yang pada akhirnya membantu integrasi dan keterlibatan aktif mereka dalam budaya Belanda yang beragam.

Selama tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, pemerintah memperluas pengakuannya terhadap lebih banyak lembaga pendidikan Islam. Pada era ini, terdapat kemajuan penting dalam perumusan struktur hukum yang mengatur pendirian dan dukungan keuangan lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan agama, seperti sekolah Islam. Dalam wacana ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2002, Siebren Miedema menganjurkan transformasi pendidikan menjadi model inklusif, yang biasa disebut dengan “Alle onderwijs bijzonder” dalam bahasa Belanda. Praksis pendidikan seperti ini mencakup pengajaran kepada semua siswa tentang berbagai tradisi agama yang dianut di seluruh Belanda. Kemudian Pemerintah Belanda mengesahkan Undang-Undang Kebebasan Pendidikan, juga dikenal sebagai Wet op het Onderwijstoezicht, diterapkan pada tahun 2006. Tujuannya adalah untuk menjamin pemerataan peluang bagi semua lembaga pendidikan, termasuk lembaga yang berafiliasi dengan Islam. Undang-undang ini memfasilitasi tingkat kemandirian yang lebih besar dalam proses perancangan kurikulum pendidikan, sekaligus menegakkan tolok ukur khusus untuk penjaminan mutu. Jumlah madrasah di Belanda menunjukkan variasi (Rietveld-van Wingerden et al., 2009).

Menurut penelitian Berglund, diketahui bahwa Belanda saat ini memiliki total empat puluh tiga sekolah dasar Islam, termasuk satu sekolah menengah pertama, yang menerima dukungan keuangan penuh dari negara. Meskipun demikian, sumber-sumber alternatif menyajikan data yang berbeda. Berdasarkan temuan Shadid dan van Koningsveld, jumlah sekolah dasar Islam di Belanda mengalami peningkatan dari 29 pada tahun 1994 menjadi 44 pada tahun 2012. Angka-angka ini terlihat dalam konteks total 8.139 sekolah dasar yang ada di negara tersebut selama lebih dari satu tahun. periode yang sama. Selain itu, perlu diketahui bahwa terdapat satu sekolah menengah Islam. Lembaga pendidikan yang biasa disebut dengan “sekolah” adalah suatu lembaga formal tempat perseorangan pada umumnya (Dronkers, 2016).

Sekolah-sekolah Islam mengalami sentimen negatif dengan munculnya laporan yang menyoroti ketidaksesuaian keuangan di dalam lembaga pendidikan Islam. Sebuah studi dilakukan untuk mengkaji praktik pengelolaan keuangan dan potensi sentimen anti-demokrasi di dalam lembaga pendidikan Islam. Terlepas dari hasil investigasi tersebut, pemberitaan media selanjutnya berkontribusi pada meningkatnya sentimen negatif terhadap pendidikan Islam (Spruyt, 2007). Menurut Driessen (2019), terjadi pergeseran tujuan sekolah dasar Islam dari perluasan kuantitas menjadi peningkatan kualitas lembaga yang sudah mapan. Permasalahan yang berkaitan dengan sekolah menengah mempunyai banyak segi (Dronkers, 2016). Menurut Driessen (2019), penutupan sekolah dikaitkan dengan masalah terkait kualitas yang tidak memadai dan tantangan administratif, serta insiden termasuk pencurian ujian akhir dan dugaan hubungan dengan organisasi Jihad teroris. Penggambaran media dan liputan selanjutnya mengenai krisis-krisis ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam di Belanda. Terdapat peningkatan konsensus di kalangan masyarakat umum untuk menghilangkan, atau setidaknya merevisi, Pasal 23 Konstitusi Belanda, yang berkaitan dengan pendidikan publik dan denominasi (Muslih, 2019).

Selain itu, pada tahun 2019, sebuah undang-undang baru *Wet op het onderwijs* (WOT) diajukan. Undang-Undang Pendidikan di Belanda mengalami perubahan penting pada tahun 2019 agar dapat secara efektif mengatasi kesulitan yang semakin besar dan menyesuaikan dengan persyaratan pendidikan yang terus berkembang. Modifikasi tersebut di atas dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan, mendorong pemerataan akses terhadap kesempatan pendidikan, dan mengakomodasi kemajuan teknologi (Franken & Vermeer, 2019b). yang bertujuan untuk memberikan pemerintah kewenangan yang lebih besar untuk melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam jika terjadi kekhawatiran terhadap standar pengajaran atau penyebaran ide-ide ekstremis (Mattei & Broeks, 2018). Proposisi ini menuai beragam dukungan dan kritik, di mana para pendukung menyatakan bahwa hal tersebut sangat diperlukan dalam mengekang radikalisme, sementara para penentang menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan praktik diskriminatif dan stigmatisasi yang menargetkan pelajar Muslim (I. Ter Avest, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, Belanda telah mengalami tren penting menuju penerapan peraturan yang lebih ketat terkait pendidikan Islam. Pada tahun 2011, sebuah undang-undang disahkan yang mengamanatkan bahwa semua lembaga pendidikan, termasuk lembaga yang berafiliasi dengan Islam, berkewajiban untuk mendorong pengembangan warga negara yang aktif dan pemajuan prinsip-prinsip demokrasi. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin bahwa setiap lembaga pendidikan secara aktif berkontribusi terhadap peningkatan kohesi dan inklusi sosial (Kamphuis & Bertram-Troost, 2023).

Secara umum, pendekatan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam menunjukkan adanya keseimbangan antara mendorong asimilasi dan menjunjung kebebasan beragama. Sistem pendidikan Belanda berperan penting dalam pembuatan kebijakan-kebijakan ini, karena sistem ini berupaya untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi sekaligus mengatasi masalah-masalah sosial. Pendidikan Islam mendapat hak penyediaan dana publik untuk sekolah-sekolah Islam tersebut dan menerapkan persyaratan dan peraturan kualitas pendidikan yang sebanding dengan yang diterapkan pada lembaga pendidikan lain di negara tersebut. Jadi di perlukan penelitian komprehensif mengenai evolusi kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam. Sistem pendidikan Belanda mengutamakan pengajaran prinsip-prinsip demokrasi, penguasaan bahasa Belanda, dan inklusi sosial di semua lembaga pendidikan, termasuk yang berafiliasi dengan Islam. Hal ini menunjukkan dedikasi pemerintah dalam memfasilitasi keberhasilan integrasi seluruh pelajar ke dalam masyarakat Belanda, terlepas dari latar belakang sosial budaya mereka, sekaligus melindungi identitas budaya dan agama mereka. Meskipun demikian, persoalan keseimbangan masih terus menjadi bahan wacana dan pembahasan yang berkesinambungan di Belanda.

Kebijakan pendidikan di Belanda telah memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan agama Islam dan masyarakat Muslim di berbagai periode sejarah. Fungsi utamanya mencakup pelestarian pengetahuan agama, penyebaran nilai-nilai moral, dan penanaman keterampilan dan pengetahuan yang penting bagi individu untuk berpartisipasi aktif dan memberi manfaat bagi komunitas mereka. Perumusan kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi latar belakang sejarah dan sosial di wilayah tersebut, ideologi politik yang dianut oleh elit penguasa, dan dinamika antara masyarakat Muslim dan komunitas internasional.

Perumusan kebijakan pemerintah Belanda mengenai pendidikan Islam dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor sejarah, sosial, dan politik. Pentingnya pendidikan Islam dalam mengembangkan pengetahuan agama, nilai-nilai moral, dan perolehan keterampilan yang penting bagi keterlibatan masyarakat tidak dapat dilebih-lebihkan, meskipun terdapat hambatan besar dan perdebatan yang terus berlanjut. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk terus berupaya mendukung dan memfasilitasi pendidikan Islam, sekaligus menghadapi tantangan dan kontroversi yang terus-menerus terjadi dalam bidang ini.

Perubahan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan Islam di Belanda telah menimbulkan dampak yang menguntungkan dan merugikan. Salah satu keuntungan penting adalah pengenalan kurikulum inti telah secara efektif mengatasi kekhawatiran terkait standar pendidikan yang ditawarkan di sekolah Islam tertentu. Penerapan pendekatan ini menjamin bahwa siswa diberikan pendidikan menyeluruh yang mencakup mata pelajaran dasar yang penting untuk pencapaian masa depan mereka. Selain itu, penerapan langkah-langkah regulasi yang ditingkatkan dan peningkatan pengawasan telah terbukti efektif dalam memitigasi risiko potensi radikalisme di lembaga pendidikan Islam. Melalui penetapan pedoman dan prasyarat yang jelas, lembaga pemerintah dapat secara efektif mengawasi konten pendidikan yang disebarluaskan, sehingga memastikan kepatuhannya terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dikung oleh Franken & Bertram-Troost (2022) Terkait dengan umat Islam di Eropa kontemporer terutama Belanda, pengelolaan 'ras' dan pengelolaan agama sering kali tumpang tindih dan saling menginformasikan melalui kebijakan integrasi dan kontra-radikalisme. Saya menganggap sekularisme sebagai sebuah formasi diskursif yang dalam arti politis mengacu pada hak prerogatif negara untuk menentukan pemisahan antara publik dan swasta, agama dan sekuler, dan perbedaan antara cara beragama yang dapat diterima dan tidak dapat diterima

Tujuan utama yang mendasari perubahan kebijakan pendidikan Islam di Belanda adalah untuk mendorong proses integrasi dan meningkatkan kohesi sosial. Para pembuat kebijakan bertujuan untuk menumbuhkan rasa inklusi dan mengurangi perpecahan masyarakat dengan memprioritaskan penyediaan pendidikan berkualitas tinggi bagi siswa Muslim, membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat aktif dalam masyarakat Belanda. Meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa proses integrasi memiliki banyak segi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak hanya mencakup bidang pendidikan saja. Mendorong integrasi bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu peluang ekonomi, penerimaan sosial, kemahiran bahasa, dan pemahaman budaya. Menurut Hass (2020), secara khusus sejak tahun 1990an, kepedulian terhadap Umat Islam sebagai subyek yang memerlukan intervensi dan regulasi negara diungkapkan dan dibentuk melalui bahasa keamanan, bahaya, dan sekularisme dalam perdebatan dan kebijakan, tidak terkecuali dalam kebijakan pendidikan.

Meski demikian, komunitas Muslim tertentu telah menyampaikan kritik terhadap perubahan kebijakan ini. Ada pihak-pihak yang berpendapat bahwa langkah-langkah ini menunjukkan fokus yang bias terhadap sekolah-sekolah Islam, sehingga melanggar kebebasan beragama mereka. Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan isi kurikulum dianggap mengancam otonomi lembaga pendidikan Islam.

Ringkasnya, perubahan kebijakan pendidikan Islam di Belanda telah membuahkan hasil yang menguntungkan dan merugikan. Meskipun penerapan kebijakan ini secara efektif mengatasi kekhawatiran terkait standar pendidikan dan potensi radikalisme, kebijakan ini juga mendapat kritik karena dianggap melanggar hak dasar kebebasan beragama. Tujuan utama dari modifikasi kebijakan ini adalah untuk memfasilitasi proses integrasi dan meningkatkan kohesi sosial. Namun, penting untuk mengakui bahwa pendidikan yang terisolasi tidak cukup untuk mengatasi semua kompleksitas yang terkait dengan integrasi. Penting untuk mengadopsi pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai aspek integrasi.

KESIMPULAN

Dampak imigran Muslim terhadap kebijakan pendidikan di Belanda melampaui batas-batas lingkungan pendidikan. Lebih jauh lagi, fenomena ini mengakibatkan meningkatnya fokus pada pengembangan wacana antar budaya dan antaragama dalam kerangka pendidikan. Kehadiran imigran Muslim berdampak pada kebijakan pendidikan di Belanda, khususnya terkait dengan masuknya pendidikan Islam ke dalam sistem sekolah Belanda. Mengingat demografi Muslim yang terus berkembang, Belanda telah menerapkan pendidikan Islam sebagai mata kuliah pilihan di lembaga-lembaga pendidikan negeri tertentu. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa Muslim sekaligus mendorong integrasi dengan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan agama di kalangan siswa non-Muslim. Namun demikian, penggabungan pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum telah menghasilkan diskusi mengenai potensi pembagian siswa berdasarkan afiliasi agama. Selain itu, dampak imigran Muslim terlihat dalam pembentukan lembaga pendidikan Islam yang dikelola swasta. Institusi pendidikan ini, yang umumnya didirikan oleh komunitas Muslim, menawarkan kurikulum yang lebih selaras dengan prinsip dan ajaran Islam. Sekolah Islam swasta memberikan alternatif terhadap sistem pendidikan konvensional Belanda, namun sekolah tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi isolasi dan promosi separatisme budaya dan agama di kalangan siswa Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Albada, K., Hansen, N., & Otten, S. (2021). Polarization in attitudes towards refugees and migrants in the Netherlands. *European Journal of Social Psychology*, 51(3), 627–643. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2766>
- Altinyelken, H. K. (2021). Critical thinking and non - formal Islamic education : Perspectives from young Muslims in the Netherlands. *Contemporary Islam*, 15(15), 267–285. <https://doi.org/10.1007/s11562-021-00470-6>
- Basori. (2019). KONTRIBUSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN MULTIKULTURALISME. *Media Komunikasi Umat Beragama*, 11(2), 131–155.
- Beijerse, J. U., & Boone, M. (2022). Introduction to Special Issue: Islam and/in Education in The Netherlands. *Religions*, 13(1), 348–359.
- Daun, H., & Arjmand, R. (2018). *Handbook of Islamic Education* (7th ed., Vol. 7). Springer International Publishing AG. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-64683-1>
- Driessen, G. (2019). Islamic schools in the Netherlands : Compromising between identity and quality ? *British Journal of Religious Education*, 12(3), 15–26.
- Driessen, G. (2021). ISLAMIC PRIMARY SCHOOLS IN THE NETHERLANDS: THE FOUNDING, THE DEBATE, AND THE OUTCOMES. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 18–31. <https://doi.org/10.1007/s10780-006-9001-0>
- Driessen, G., & Merry, M. S. (2006). Islamic schools in the Netherlands: Expansion or marginalization? *Interchange*, 37(3), 201–223. <https://doi.org/10.1007/s10780-006-9001-0>
- Dronkers, J. (2016). Islamic Primary Schools in the Netherlands Islamic Primary Schools in the Netherlands. *Journal of School Choice*, 10(1), 6–21. <https://doi.org/10.1080/15582159.2015.1131508>
- Franken, L., & Bertram-Troost, G. (2022). Passive Freedom of Education: Educational Choice in Flanders. *Religions*, 13(12), 1–21.
- Franken, L., & Vermeer, P. (2019a). Deconfessionalising RE in pillarised education systems: a case study of Belgium and the Netherlands. *British Journal of Religious Education*, 41(3), 272–285. <https://doi.org/10.1080/01416200.2017.1405792>
- Franken, L., & Vermeer, P. (2019b). Deconfessionalising RE in pillarised education systems: a case study of Belgium and the Netherlands. *British Journal of Religious Education*, 41(3), 272–285. <https://doi.org/10.1080/01416200.2017.1405792>
- Hass, B. S. (2020). The burka ban: Islamic dress, freedom and choice in the Netherlands in light of the 2019 Burka ban law. *Religions*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/rel11020093>
- Kamphuis, E. P., & Bertram-Troost, G. D. (2023). Religious schools in the Netherlands: An analysis of arguments and assumptions in a tense public debate. *International Journal of Educational Development*, 100(1), 102792. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102792>
- Leeman, Y. (2008). Education and Diversity in the Netherlands. *European Educational Research Journal* Volume, 7(1), 50–59.

Mattei, P., & Broeks, M. (2018). From multiculturalism to civic integration: Citizenship education and integration policies in the Netherlands and England since the 2000s. *Ethnicities*, 18(1), 23–42. <https://doi.org/10.1177/1468796816676845>

Miller, J. (2011). Islam in Education in European Countries: Pedagogical Concepts and Empirical Findings. In *Journal of Contemporary Religion* (Vol. 26, Issue 3). <https://doi.org/10.1080/13537903.2011.616072>

Muslih, M. (2019). Islamic schooling , migrant Muslims and the problem of integration in The Netherlands Islamic schooling , migrant Muslims and the problem of integration in The Netherlands. *British Journal of Religious Education*, 00(00), 1–10. <https://doi.org/10.1080/01416200.2019.1628004>

Rietveld-van Wingerden, M., Westerman, W., & Ter Avest, I. (2009). Islam in education in the Netherlands: history and actual developments. *Islam in Education in European Countries, Pedagogical Concepts and Empirical Findings*, 14(8), 69–94.

Ritonga, S. (2022). Peranan Pendidikan Islam dalam Merekonstruksi Identitas Muslim di Belanda. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(1), 21–36.

Spruyt, B. J. (2007). “Can’t We Discuss This?” Liberalism and the Challenge of Islam in the Netherlands. *Orbis*, 51(2), 313–329. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2007.01.009>

Tahira, S. S., & Saadi, A. M. (2022). Islamic Education: Aims, Objectives and its Implications for the Society. *Al-Lauh*, 1(2), 7–27.

Ter Avest, I. (2023). Epilogue of Special Issue “Islam in/and Education in The Netherlands.” *Religions*, 14(8), 1–7. <https://doi.org/10.3390/rel14080973>

Ter Avest, K. H. (Ina., & Rietveld-van Wingerden, M. (Marjoke). (2017). Half a century of Islamic education in Dutch schools. *British Journal of Religious Education*, 39(3), 293–302. <https://doi.org/10.1080/01416200.2015.1128391>

van Bijsterveld, S. (2013). Religion and the Secular State in the Netherlands. *Neuere Entwicklungen Im Religionsrecht Europaeischer Staaten*, 61(July), 93–112.